



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMMAH KONSTITUSI
NOMOR 11.1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membuka akses bagi masyarakat terhadap informasi publik Mahkamah Konstitusi, mempertahankan akuntabilitas dan transparansi, serta kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan pemutakhiran daftar informasi publik Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2026.



- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Mahkamah Konstitusi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Yth. Sekretaris Komisi Informasi Pusat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS JENDERAL
HERU SETIAWAN



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026**

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1.	Pengumuman	(Masing-masing Biro/Pusat Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
2.	Layanan Pengaduan dan Informasi	(Masing-masing Biro/Pusat Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
3.	Profil MK <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah • Visi Misi • Kedudukan dan Kewenangan • Struktur Organisasi • Profil Hakim Konstitusi 	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	

**Tidak terdapat informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian.*



	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hakim Konstitusi ❖ Hakim Masa Jabatan Sebelumnya · Profil Panitera <ul style="list-style-type: none"> ❖ Panitera ❖ Panitera Masa Jabatan Sebelumnya · Profil Sekretaris Jenderal <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sekretaris Jenderal ❖ Sekretaris Jenderal Masa Jabatan Sebelumnya 					
4.	Profil Dewan Etik <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Etik 	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Dewan Etik • Keputusan Dewan Etik 	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
6.	Profil Majelis Kehormatan MK	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	



	<ul style="list-style-type: none"> Majelis Kehormatan MK 					
7.	<ul style="list-style-type: none"> Jadwal Sidang MKMK 	Sekretariat MKMK	Bidang Persidangan Sekretariat MKMK	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
8.	<ul style="list-style-type: none"> Putusan MKMK 	Sekretariat MKMK	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat MKMK	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
9.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan MKMK 	Sekretariat MKMK	Bidang Substansi Sekretariat MKMK	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
10.	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan MKMK 	Sekretariat MKMK	Bidang Registrasi dan Juru Panggil Sekretariat MKMK	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
11.	Permohonan Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
12.	Perkara Diregistrasi	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	Hingga Pengucapan Putusan



			Teknis Persidangan			
13.	Jadwal Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
14.	Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
15.	Ikhtisar Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
16.	Anotasi	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
17.	Prosedur Pendaftaran Permohonan Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
18.	Rekapitulasi Perkara	Biro Hukum dan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	



		Administrasi Kepaniteraan	Teknis Persidangan			
19.	Tahapan Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
20.	Risalah Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
21.	Peraturan MK	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
22.	Peraturan Ketua MK	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
23.	Peraturan Sekretaris Jenderal	(Masing- masing Biro/Pusat Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	(Masing- masing Biro/Pusat Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
24.	Rencana Strategis	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	



25.	Rencana Kerja	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
26.	Dokumentasi Foto Persidangan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital	
27.	Dokumentasi Audio Persidangan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
28.	Dokumentasi Video Persidangan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (YouTube MK)	
29.	Siaran Pers	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	



30.	Berita Sidang dan Non Sidang	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
31.	Iklan Layanan Masyarakat	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK, Media Sosial MK)	
32.	Laporan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Keuangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
33.	Laporan Kinerja/LAKIP	Inspektorat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
34.	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
35.	Laporan Tahunan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	



			Sama Dalam Negeri			
36.	Data Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
37.	Statistik Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK) Digital (Laman MK)	
38.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara: <ul style="list-style-type: none"> • Hakim Konstitusi • Panitera • Sekretaris Jenderal 	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Keuangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
39.	Daftar (Proposal) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
40.	Nota Kesepahaman	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
41.	Informasi Lelang	Biro Umum	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	



			Barang Milik Negara			
42.	Daftar Inventaris Barang	Biro Umum	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
43.	Jurnal Konstitusi dan <i>Constitutional Review</i>	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara	Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi	Gedung Mahkamah Konstitusi	Cetak, Digital (Laman MK)	
44.	Hasil Penelitian	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara	Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
45.	Putusan Landmark	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
46.	Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
47.	Majalah Konstitusi	Biro Hubungan	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	



		Masyarakat dan Protokol	dan Kerja Sama Dalam Negeri			
48.	Penghargaan	(Masing-masing Biro/Pusat Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	(Masing-masing Biro/Pusat Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
49.	Informasi Pelayanan Publik	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
50.	Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Biro Umum	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	
51.	Amicus Curiae	Biro Humas dan Protokol	Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	

